

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI DI DAERAH MINAHASA SELATAN SEHUBUNGAN DENGAN OTONOMI DAERAH**

**Oleh : Sicillia Mohede<sup>1</sup>**

### **ABSTRAK**

Indonesia is a developing country that has a national development purpose and direction are manifesting a fair and prosperous society. Fair and prosperous society can be realized through the development in different fields of economy.

The benefits of the investment for the economy are real. This is because need the labor in region, improvements to public facilities that relate to the community as well as providing income for the increase of the area. Thus the South Minahasa received with any investment back. Legal protection is noteworthy because investors consider the legal guarantees provided. Based on Act No. 25 of 2007 about investing gives the rationale that Indonesia accept the investment activities in the form of foreign investment and domestic capital investment. Enhance and embody the meaning of the investment is one of the factors supporting that embody a balance, progress dan unity of the regional and nationl economy. In any investment activities provide good impact for the first nation, it is by showing that an investment activity can create jobs, promote sustainable economic development, increase the capacity and capabilities of national technologies, encourage economic development and realizing prosperity for grass roots community.

Develop a more interesting investment is strengthening regulation in South Minahasa invintation, institutional investment offices and decentralization. To make it happen then the whole potential of the regency of South Minahasa in the autonomous region was used in attracting investor interest so investment activities.

### **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara berkembang yang memiliki tujuan dan arah pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu mayarakat adil dan makmur. Masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang diantaranya ekonomi. Sektor ekonomi didaerah Indonesia lebih cenderung pada sektor Pertanian, Perikanan,

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

Kehutanan, peternakan dan pertambangan. Pelaksanaan pembangunan ekonomi memerlukan modal yang besar dalam jumlah yang banyak.

Keberhasilan dalam bidang perekonomian ini dapat dicapai dengan beberapa cara. Diantaranya yaitu menyetujui adanya investasi daerah. Perkembangan investasi di Indonesia merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan investasi di Indonesia yaitu dengan pemberlakuan otonomi daerah.

Investasi merupakan salah satu instrument dalam sistem perekonomian suatu bangsa yang sangat penting, tidak mengherankan jika di negara maju maupun negara Indonesia berusaha secara optimal untuk menjadi tujuan investasi guna menggerakkan roda perekonomian yang berhubungan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor serta kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup ini tidaklah berlebihan jika dikemukakan bahwa kehadiran investasi merupakan suatu hal yang signifikan dalam pembangunan nasional atau tepatnya dalam menggerakkan roda perekonomian yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal memberikan faedah bahwa Indonesia menerima kegiatan investasi dalam bentuk penanaman modal asing maupun dalam negeri. Dalam pertimbangan (konsiderans) huruf c, bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk pengelolaan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebagian asas penanaman modal yang penting dalam menunjukkan kegiatan investasi yaitu pasal 3 huruf j keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Daerah Minahasa Selatan memiliki potensi Pertambangan yaitu Emas, yang terdapat di Toyopon kecamatan Motoling dengan luas 2.000 Ha, Liandok dan Karow kecamatan Tompaso Baru dengan luas 2.000 Ha, sulu dan Pasiaten kecamatan Tatapaan dengan luas 7.500 Ha, Picuan lama kecamatan Ranoyapo dengan luas 2.000 Ha, Tokin luas 2.500 Ha dan Karimbow 1.000 Ha kecamatan Motoling Timur, Tewasen kecamatan Maesaan dengan luas 3.500 Ha. Belerang, terdapat di Amurang timur terukur dengan total 185.136 Ton. Kaolin, terdapat di Batukulo kecamatan Tompaso Baru. Lempung, Tokin dan Karimbow Kecamatan Motoling timur dengan total 3.714.375 M<sup>3</sup>, Radey Kecamatan Tenga. Batu Kapur, Blongko kecamatan Sinonsayang dengan luas 50 Ha.

Pasir Besi, Poigar kecamatan Sinonsayang dengan luas 3.978.000 M<sup>2</sup>, Sidate dan sekiranya kecamatan Tenga dengan luas 4.127.000 M<sup>2</sup>. Batu, Sirtu dan Pasir, Lelema kecamatan Tatapaan terindikasi total 1.123.800 M<sup>3</sup>, Sungai

Ranotuana kecamatan Tumpaan total 988.800 M<sup>3</sup>, Sungai Lopana kecamatan Amurang Timur indikasi total 3.195.000 M<sup>3</sup>, Sungai Ranomea 174.350 M<sup>3</sup>, Sungai Lewet 128.850 M<sup>3</sup> dan Sungai Pondang 483.650 M<sup>3</sup> kecamatan Amurang, Sungai Ranoyapo 1.934.000 M<sup>3</sup>, Sungai Kapitu 389.000 M<sup>3</sup> Kecamatan Amurang Barat, Sungai Ranoyapo 9.495.000 M<sup>3</sup> kecamatan Tompaso Baru, Sungai Sapa 5.412.000 M<sup>3</sup>, Sungai Batu Kapal 2.080.000 M<sup>3</sup>, Sungai Boyongpante 680.000 M<sup>3</sup>, Sungai Tenga 3.468.000 M<sup>3</sup>, Sungai Nanapaan 2.152.000 M<sup>3</sup>.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkannya maka seluruh potensi kabupaten minahasa selatan pada era otonomi daerah ini digunakan dalam menarik minat sehingga terjadinya kegiatan investasi. Investasi merupakan bagian yang integral dalam rangka menunjang pendapatan daerah secara regional. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan secara kumulatif terus menerus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini terlihat dari besaran Produksi PDRB selama 12 tahun terakhiratas dasar harga, dimana angka PDRB pada tahun 2000 sebesar 799. 862,30 juta Rupiah, pada tahun 2011 meningkat menjadi 2.011.886,71 juta Rupiah. Sedangkan PDRB atas harga konstan pada tahun 2011 sebesar 1.408. 761,71 juta Rupiah, sehingga secara riil ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 6,03 persen dari Tahun sebelumnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan keadaan ini maka pemerintah berupaya menggerakkan sumber daya alam yang ada untuk dapat dikelola dan investor tertarik menanamkan modal. Daerah Minahasa selatan merupakan daerah yang menerima investasi dan menjalankannya berdasarkan konsep otonomi daerah. Mengembangkan investasi yang lebih menarik adalah memperkuat kelembagaan dan keleluasaan peran daerah sesuai prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Secara teoritis, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dalam hal ini Bupati diberi otoritas untuk mengelola daerahnya secara otonom untuk menarik investor menanamkan modalnya di daerah dengan memberikan ketentuan (perda) yang meringankan investor asing. Sejalan dengan itu kelembagaan bidang investasi menjadi faktor yang kritis dan menjadi titik paling lemah, sehingga penataan dan penguatannya perlu diwujudkan.

Pemberian kewenangan dalam mengelola rumah tangga suatu daerah diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah yang dalam konsepnya diatur pada pasal 1 angka (4) memberikan pemahaman bahwa suatu daerah telah menerima kewenangannya dalam mengupayakan terjadinya investasi baik hak, kewenangan dan kewajiban sehingga dapat mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Lembaga Statistik, Minahasa Selatan *In Figures*, 2012, Halaman 300

<sup>3</sup> *Id*, Halaman 315.

peraturan perundang-undangan. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemerintahan daerah ini akan dapat memperjelas konsep tataran pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan investasi di Indonesia terlebih khusus daerah Minahasa Selatan.

Sehubungan dengan kegiatan investasi maka investor harus memenuhi syarat atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undang sehingga dapat memudahkannya dalam mengajukan izin untuk melakukan investasi. Menurut Salim HS dalam pendapatnya yang menyatakan Hukum investasi mengatur hubungan investor dengan penerima modal. Dalam keadaan ini maka status investor dapat dibagi menjadi dua investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau diperbolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya.<sup>4</sup>

Maka Negara Indonesia dalam keputusan presiden nomor 117 tahun 1999 tentang tata cara penanaman modal mengatur metode dan langkah setiap investor yang akan melakukan investasi di daerah, sedangkan dalam keputusan presiden nomor 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap. Hal ini semakin menguatkan dan membuka peluang kepada investastor sehingga memiliki keinginan untuk berinvestasi dalam di daerah Minahasa Selatan.

Sehubungan dengan investasi ini peranan pemerintah daerah untuk menjalankan koordinasi sangat dibutuhkan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dijalankan dengan kewenangan otonomi daerah yang telah diberi berdasarkan perundang-undangan. Dalam pengembangan potensi daerah tersebut investasi merupakan bagian integral. Oleh karena itu potensi daerah harus dapat menjadi sasaran bagi pengelolaan pendapatan asli daerah. Namun yang menjadi faktor-faktor penghambat yaitu dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur terhadap kepastian perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan investasi di daerah. Sehingga nampak jelas kebijakan daerah terhadap mewujudkan iklim yang baik tidak sesuai dengan prinsip otonomi investasi otonomi daerah ini. Maka keadaan ini pun menghambat masuknya investasi ke daerah.

Setelah diberikan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Produksi menjadi izin Usaha pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

---

<sup>4</sup> Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, halaman 11.

Sumber Energi Jaya pada 4 Juni 2010, terjadi penolakan oleh Masyarakat disebabkan tidak disosialisasikan adanya Wilayah Tambang dan hal ini tidak menunjang adanya kegiatan investasi. Pemberian izin oleh pemerintah Provinsi dalam melaksanakan dan menerima investasi di daerah telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pada saat investor melaksanakan kegiatan, rakyat sekitar tidak menerima dengan baik, hal ini yang memerlukan kepastian hukum.

Era otonomi menambah permasalahan baru yaitu tarik menarik kewenangan baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota memberikan suatu prosedur yang berbelit-belit terhadap kegiatan investasi. Sekalipun berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dalam meningkatkan pembangunan disektor investasi dikarenakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat namun masalahnya tidak sesederhana ini. Sebab *de facto* pelaksanaan pula terhadap kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan di bidang investasi dalam bentuk pembagian urusan pemerintahan belum sepenuhnya disentuh oleh pemerintah daerah minahasa selatan seperti yang ditegaskan dalam konsep otonomi daerah.

Hambatan yang ditemukan lainnya yaitu panjangnya prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam perizinan dalam keputusan presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang tata cara penanaman modal, keputusan Presiden nomor 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem satu atap. Prosedur yang panjang semakin memberikan ketidak pastian pada investor baik waktu teralisasinya investasi, maupun biaya yang diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan bahwa yang menjadi potensi daerah tidak hanya merupakan sumber daya alam saja, melainkan beberapa faktor yang penting sehingga semakin meningkatkan kegiatan investasi di daerah Minahasa Selatan. Tidak mudah menarik perhatian investasi tetapi tidak mudah pula menempatkan investor sesuai dengan keadaan daerah geografis. Di daerah minahasa selatan memiliki banyak sumber daya alam yang terkandung namun masih kurangnya minat investor karena beberapa faktor. Maka sangatlah penting bagi daerah termasuk Negara adanya investasi. Dengan dasar pemikiran inilah maka perlu adanya suatu kajian khusus yang menjawab setiap pertanyaan mengapa kegiatan investasi selalu berakhir dengan konflik.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang dapat menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investasi berdasarkan otonomi daerah di kabupaten minahasa selatan ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan investasi di daerah Minahasa Selatan ?

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai sarana berbentuk tertulis yang berisi tentang cara bagaimana pendekatan masalah yang digunakan, sumber bahan hukum yang terkait, metode pengumpulan data serta teknik analisa data. Berdasarkan pendapat Bambang Sunggono terhadap penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan.<sup>5</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif Empiris. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>6</sup>

Adapun sumber data yang menjawab setiap pembahasan dari permasalahan yang timbul yaitu : Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan investasi dan penanaman modal, seperti : Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-undang Nomor 12 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keputusan presiden nomor 117 tahun 1999 tentang tata cara penanaman modal, keputusan presiden nomor 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap.

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang perlindungan hukum terhadap investor di daerah pada era otonomi daerah. Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dengan Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 27.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 13

## D. PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi

Kegiatan investasi yang sejak terbentuknya Undang-undang Penanaman modal Asing dan undang-undang Penanaman Modal dalam Negeri Tahun 1966-1967 menjadi latar belakang penting adalah pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dalam mewujudkannya maka perlu adanya kepastian dalam memberikan perlindungan hukum. Untuk mewujudkan tujuan nasional, pemerintah harus memikirkan segala aspek kehidupan untuk menggerakkan perekonomian maka setiap Pemerintah Daerah yang dalam pemberian desentralisasi otonomi daerah perlu memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjamin tidak ada pihak yang dirugikan baik dalam pemenuhan kesejahteraan bagi rakyat dan iklim yang kondusif bagi investor dalam berkegiatan investasi. Keselarasan antara kedua perihal penting ini perlu diwujudkan dalam kenyataan oleh undang-undang yang berlaku di daerah.

Konsep dari Prinsip Swadaya yang dikemukakan oleh Notonagoro yang dikutip oleh Ferry Aries Suranta dalam bukunya Penggunaan Lahan Hak Ulayat memberikan pandangan bahwa tidak dianalisa, merupakan tujuan yang kuat sehingga sidang MPRS Tahun 1966 menganggap perlu untuk berulang-ulang kali dan mengulangi hubungan politik pembangunan ekonomi yang bebas aktif.<sup>7</sup> Berdasarkan pendapat ini investasi merupakan salah satu target dalam menunjang adanya pembangunan ekonomi terutama ekonomi daerah sehingga perlu adanya kesinambungan dalam mewujudkan dan mencapai tujuan kesejahteraan, jadi Negara Indonesia sendiri mengakui perlu adanya investasi.

Investasi di zaman orde lama di atur dalam Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Selanjutnya, diperbaharui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1960 kemudian di cabut tahun 1965 melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965. Undang-undang investasi di Indonesia mengalami kekosongan hukum (*Recht Vacundang-undangm*) pada tahun 1965-1967 di masa orde baru. Kemerosotan ekonomi di akhir masa orde baru memaksa pemerintah Indonesia membuat Undang-undang investasi baru walaupun ada pihak yang setuju maupun berlawanan terhadap Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

Dalam meningkatkan kemajuan di bidang investasi terutama di daerah minahasa selatan, maka pemerintah daerah mengusahakan berbagai upaya. Upaya tersebut diantaranya dengan pendelegasian dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan investasi. Namun berbagai kendala menjadi suatu indikator karena pendelegasian kewenangan tersebut belum sepenuhnya

---

<sup>7</sup> Ferry Aries Suranta, *Penggunaan Lahan Hak Ulayat dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Halaman 139.

berjalan.<sup>8</sup> Demikian pula terjadi di daerah minahasa selatan pelaksanaan tidaklah sepenuhnya. Beberapa pemikiran yang mendasar tidak terlaksana dengan baik akibat belum tertata dengan cermat pembagian pengelolaan investasi. Jadi kewenangan dalam menjalankan perintah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berdasarkan pasal 10 ayat (1) dan pasal 14. Seperti yang dikemukakan oleh Ridwan H. R :

*Pendelegasian ini harus diterapkan dengan mengingat teori bahwa wewenang yang dimiliki oleh penyelenggara Negara sebagai konsekuensi di anutnya asas legalitas dalam Negara hukum, sehingga kewenangan diperlukan dalam melegitimasi tindakan penyelenggaraan Negara dan sumber kewenangan sendiri berasal dari peraturan perundang-undangan.*<sup>9</sup>

Kondisi pelaksanaan hukum seperti ini memberikan pemahaman menjalankan undang-undang yang tidak sempurna karena tidak adanya keseimbangan yang terjadi antara sifat materil dan formilnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 30 ayat (3) bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.<sup>10</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh C. F. G Sunarjati Hartono yang dikutip oleh Sentosa Sembiring bahwa dalam Undang-undang Penanaman modal sebelumnya mengatur wewenang pemerintah :

- a. Menentukan perincian bidang-bidang bagi modal asing;
- b. Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing secara kasuistik;
- c. Menetapkan bidang-bidang usaha tertentu yang tidak boleh ditanam oleh modal asing;
- d. Menetapkan bidang-bidang usaha yang dapat diadakan kerjasama antara modal asing dan modal nasional.<sup>11</sup>

Dalam pasal 27 undang-undang Nomor 25 tahun 2007 pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal. Jadi kewenangan untuk memutuskan diterimanya suatu investasi dan koordinasi yang terjalin masih ditentukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) berdasarkan pasal 28. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sedangkan di daerah minahasa selatan kewajiban tersebut dipegang oleh kantor Penanaman modal Daerah, yang dalam keadaan baru dibentuk pada tahun 2010.

---

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, *Op-Cit*, hal 93

<sup>9</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, halaman 65.

<sup>10</sup> I.B.R Supancara, *Iktisari ketentuan Penanaman Modal*, Nasional Legal Reform Program, PT Gramedia, Jakarta, 2010, halaman 13.

<sup>11</sup> Sentosa Sembiring, *Loc-cit*.



Masalah pengelolaan investasi yang masih bersifat sentralisasi akan menimbulkan kekurangan yang sangat signifikan bagi daerah maupun kegiatan investasi tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mempermudah terjadinya kegiatan investasi termasuk dalam membentuk dan menerbitkan kebijakan-kebijakan sehingga dengan maksud ini maka metode investor dalam berhubungan dengan pemerintah semakin dipermudah. Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa ada izin yang jelas menurut hukum dan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya.<sup>12</sup> Namun tidak jarang dengan mengurus izin saja membutuhkan banyak pengorbanan dikarenakan mekanismenya yang panjang.

Hal ini akan dapat dibuktikan dengan adanya Perusahaan tambang sebagai investasi di daerah Minahasa Selatan yang dikenal sebagai perusahaan Produksi PT. Sumber Energi Jaya yang perizinan yang kecil diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Minahasa Selatan dalam mewujudkan setiap kemudahan-kemudahan berinvestasi, dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan teknis tertentu, yang pada umumnya memberikan kewenangan perijinan kepada Pemerintah Pusat, baik melalui Menteri Teknis terkait maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam daerah Minahasa Selatan yang kiranya perlu diperhatikan dalam menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang investasi ini, harus pula memperhatikan sistem hukum yang berlaku, terutama pengaturan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Pernyataan Di Bidang Penanaman Modal, dan sebagainya.

Ketidak jelasan serta kekaburan batas kewenangan di bidang investasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini, lebih disebabkan pengaturan perundang-undangan yang masih memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Pemerintah Pusat dan semangat otonomi Daerah pada sisi lainya tidak terlaksana. Akibatnya, proses perizinan di bidang investasi menjadi terkesan rumit dan berbelit-belit, karena menyangkut banyak kewenangan instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan fungsi perizinan itu sendiri menjadi seperti tanpa makna.

Sebagaimana diketahui, untuk melaksanakan investasi dibutuhkan sejumlah izin baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, selain membutuhkan waktu yang cukup lama juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Izin tersebut diantaranya :

- a. Izin persetujuan Penanaman modal (SP. PMA/SP. PMDN)
- b. Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas atas pengimporan barang modal/bahan baku/penolong.
- c. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)

---

<sup>12</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, halaman 155.

- d. Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing (RPTKA)
- e. Izin Usaha Tetap (IUT)
- f. Izin Lokasi diberikan dan ditandatangani oleh Bupati/walikota
- g. Izin Undang-undang Gangguan (UNDANG-UNDANGG/HO) oleh Kabupaten/Kota
- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Kabupaten /Kota
- i. Izin memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IKTA).

Melihat dengan berdasarkan izin yang wajib dilakukan oleh investor maka cukup membutuhkan waktu. Untuk itu, bagaimana cara memecahkan masalah yuridis yang ditimbulkan oleh kelalaian pengaturan peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya dengan pelayanan investasi dalam satu atap. Pemerintah dalam hal ini BKPM, mengeluarkan *policy statement* di bidang investasi yang diantara lain mengemukakan, pemerintah menjamin bahwa pelayanan perizinan dalam era otonomi daerah tidak akan lebih buruk dari pada yang berlaku sekarang.<sup>13</sup> Dengan sistem pelayanan satu atap baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berharap hambatan dalam melakukan investasi terpecahkan dengan keberadaan sistem ini. Harapan yang timbul ini membuka peluang besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di indonesia atau di daerah, namun investor yang menanamkan modal belum merasakan aplikasi atau penerapan peraturan yang baik.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Investasi Di Daerah Minahasa Selatan**

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal memberikan asas yang menjadi dasar dalam undang-undang dan setiap kegiatan investasi yang berjalan. Undang-undang Penanaman modal berupaya untuk mencapai nilai-nilai yang hidup dan berkembang sebagai tatanan dalam masyarakat.

Secara teoritis setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah dalam hal ini Bupati diberi otoritas untuk mengelola daerahnya secara otonom. Dari dasar pemikiran ini pemerintah daerah berpeluang besar untuk menarik calon investasi di daerah Minahasa Selatan. Disisi lain, bagi investor sendiri adanya kebijakan otonomi daerah bisa membandingkan daerah mana yang paling memberi peluang jaminan kepastian hukum bagi investasi.

Seperti yang tertulis pada pembahasan sebelumnya para investor dalam melakukan kegiatan penanaman modal tidak terlepas dari tujuan bisnis.oleh Karen itu para investor sebelum melakukan penanaman modal selain melihat adanya peluang bisnis juga mempelajari berbagai aturan dan kondisi daerah yang akan dilakukannya penanaman modal. Aturan yang dimaksud adalah ada tidaknya aturan yang mengatur kegiatan investasi di daerah namun harus

---

<sup>13</sup> *Id*, halaman 103.

diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan di daerah tersebut tidak memberatkan bagi para investor atau memberikan kepastian hukum yang semakin jelas.

Dalam rangka meningkatkan investasi di daerah, maka antara lain diupayakan mempermudah pemberian pelayanan izin investasi dengan memperbanyak pusat pelayanan pemberian izin investasi.<sup>14</sup> Pendapat ini dikemukakan oleh Rai Widjayakarena hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan iklim investasi termasuk di daerah.

Daerah Minahasa Selatan berusaha mewujudkannya dengan suatu kebijakan pada tahun 2010 membentuk Kantor Penanaman Modal yang berupaya mempermudah terjadinya kegiatan investasi di daerahnya. Adapun kekurangan instansi tersebut, secara langsung di dapati setelah melakukan wawancara langsung yaitu kurangnya kemampuan penguasaan dalam bidang Penanaman modal bagi stiap pekerja, koordinasi yang kurang baik antara kantor perizinan dengan mengingat bahwa daerah Minahasa Selatan kantor perizinan dengan Kantor Penanaman Modal di dirikan secara terpisah sehingga setiap laporan investasi tak jarang tidak diterima secara tertulis oleh kantor penanaman modal. Dengan demikian maka setiap tugas pokok tidak dapat dilakukan oleh para bagian-bagian yang ada dalam kantor penanaman modal daerah Minahasa Selatan.

Investasi menjadi salah satu kata kunci dalam setiap upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru bagi perluasan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Melalui peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi kapital domestik maupun luar negeri, akan menjadi faktor pengungkit yang sangat dibutuhkan bagi suatu negara dalam menggerakkan mesin ekonomi mengawal pertumbuhan yang berkelanjutan.

Peningkatan investasi diharapkan akan berperan sebagai medium transfer teknologi yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap meningkatnya produksi dan produktivitas, serta daya saing ekonomi suatu daerah. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan ke kondisi yang lebih baik.

Kegiatan investasi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi, mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen, serta manfaat bagi investor lokal. Manfaat yang paling menonjol adalah berkembangnya kolaborasi yang saling menguntungkan dan terjalin antar investor asing dengan kalangan pebisnis lokal, bisnis dan industri komponen berkembang dengan pesat, termasuk berbagai kegiatan usaha yang berorientasikan ekspor.

---

<sup>14</sup> Rai Widjaya, *Penanaman Modal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, halaman 5.

Daerah Minahasa Selatan berupaya menciptakan iklim investasi yang baik. Namun kurangnya kesadaran dari Pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa investasi berpengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian maka setelah investor melakukan kegiatan malah tidak siap diterima oleh masyarakat, hal ini yang terjadi di daerah Minahasa Selatan oleh Keberadaan Perusahaan tambang PT. Sumber Energi Jaya.

Bidang usaha pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang mendapat prioritas utama dari pemerintah sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal, baik bagi pihak asing maupun pihak dalam negeri. Untuk itu, pemerintah berusaha untuk dapat mengarahkan dan mengelola sumber-sumber daya alam yang termasuk dalam bidang usaha pertambangan. Bidang usaha pertambangan meliputi pertambangan minyak bumi, gas bumi, batubara, logam, timah, bijih nikel, bausit, pasir besi, perak serta konsentrat tembaga. Hak pengelolaan pertambangan merupakan hak menguasai Negara sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ( UNDANG-UNDANGD 1945 ) ayat ( 2 ) dan ( 3 ) menyebutkan bahwa ayat ( 2 ) : cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

#### **E. PENUTUP**

Pemerintah Daerah harus berupaya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif secara maksimal dengan menggerakkan lembaga Kantor penanaman Modal melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berjalannya kegiatan Investasi. Dan hal yang paling penting pula melakukan sosialisasi kepada Masyarakat sehingga menjamin kesiapan masyarakat dalam menerima investasi dan juga dibutuhkan peraturan investasi daerah yang mendukung kepastian hukum bagi investor.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta , 1999.
- Kertapraja Koswara, Pemerintahan Daerah, Inner, Jakarta, 2010.
- Pattinasarany Yohanes, Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2011.
- Ridwan, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Salim, Hukum investasi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Edisi 2, Jakarta, 2008.
- Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Suranta Ferry, Penggunaan Lahan Hak Ulayat dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Supancara, Ikhtisari ketentuan Penanaman Modal, Nasional Legal Reform Program, PT Gramedia, Jakarta, 2010.
- Simatupang Richard, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Tim Redaksi, Undang-undang Nomor 32 tentang otonomi daerah dan pilkada, Lima Bintang, Surabaya.
- Widjaya Rai, Penanaman Modal, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Perlindungan hukum terhadap pasien ditinjau dari perjanjian terapeutik (transaksi medis), Universitas Sumatera utara.

***Internet :***

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan>, Teori Kedaulatan.